

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Fikahati Aneska. Jakarta. 2002.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2010.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Gramedia Pusaka Utama. Jakarta. 2000.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal: Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Hukum Indonesia. Jakarta. 2005.
- Kadir, Abdul. *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. CV Dharma Persada Darmasraya. Medan. 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Buku I. Alumni. Bandung. 2000.
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Refika Aditama. Bandung. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Hukum Agraria*. Karunika. Jakarta. 1988.
- _____, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1988
- _____, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 2011.

- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Refika Aditama. Semarang. 2007.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1983.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung. 1999.
- Pandu, Yudha. *Klien dan Advokat dalam Praktek*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2004.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing. Surabaya. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 1991.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum*. Nuansa Aulia. Bandung. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas. Jakarta. 2008.
- Suparman, Erman. *Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Fokus Media. Bandung. 2004.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Cetakan Pertama. Gramedia. Jakarta. 2012.

Jurnal Publikasi

- Bari, Muhammad. Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan *Land Rights* Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. Vol. 3 Nomor 1. Oktober 2023.
- Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46 Nomor 4. 2017.
- Gayo, Ahyar Ari. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 Nomor 3. 2018.
- Gunawan, I., H. Alting, dan R. Alauddin. Kajian Ketidakhadiran Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Khairun Law Review*. Vol. 1 Nomor 1. 2021.
- Haarsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dan Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2002.

- Harmani, Ratna. *Titik Singgung Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Tanah Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2009.
- Hutagalung, Arie S.. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. Laporan Tahunan Agraria 2023. Jakarta. 2023.
- Lubis, D. Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemiliknya. *Recital Review*. Vol. 3 Nomor 1. 2021.
- Murad, Rusmadi. Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah. Makalah Disajikan Pada Seminar Nasional “Sengketa Tanah. Permasalahan dan Penyelesaiannya”. Jakarta. 20 Agustus 2003.
- Purba, Hasim. “Reformasi Agraria dan Tanah Untuk Rakyat: Sengketa Pertani VS Perkebunan”. *Jurnal Law Review*. Vol. 10 Nomor 2. 2010.
- Rusman. dkk. Dilema Kepemilikan Sertipikat Ganda: Kasus Kontroversial Obyek Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 11 Nomor 23. Mei 2024.
- Saraswati, Cindy Nabila dan Atik Winanti. “Pembentukan Pengadilan Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8 Nomor 1. 2021.
- Universitas Gadjah Mada. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Suatu Ringkasan Eksekutif. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta.
- Waluya, Carrissa Nurfaliza. dkk. Kepastian Hukum Terhadap Kasus Tumpang Tindih Pada Sebagian Bidang Tanah yang dikuasai oleh Dua Pihak Pemilik Sertipikat Hak Milik. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol. 2 Nomor 3. September 2024.
- Wuisan, Edwin Nehemia. Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5 Nomor 6. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Sumber Lainnya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. <diunduh tanggal 20 Agustus 2024>

